

PORTOFOLIO STUDI SOSIAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN

DOSEN PENGAMPU:

Dr. Pujiati, M.Pd.

Dr. Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.

Dr. Nikki Tri Sakung, S.Pd., M.Pd.



DISUSUN OLEH:

Amaradina Fatia Sari : 2523031004

**MAGISTER ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Aktivitas ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ekonomi konvensional yang hanya fokus pada hitungan laba-rugi sering kali mengabaikan faktor budaya, kebiasaan, dan modal sosial di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, studi sosial ekonomi hadir sebagai sudut pandang penting untuk memahami bagaimana dinamika sosial dan keputusan ekonomi masyarakat saling mempengaruhi. Di sisi lain, tantangan dunia kerja yang kompetitif menuntut perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang tidak hanya mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja melalui pendidikan kewirausahaan (Ohara dkk., 2025). Menggabungkan ilmu sosial ekonomi dengan kewirausahaan sangat strategis, karena bisnis yang baik tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, melainkan juga harus mampu memberikan dampak positif dan memberdayakan komunitas lokal (Mulawarman, 2026).

Pendidikan ekonomi yang terintegrasi dengan kewirausahaan terbukti efektif dalam membentuk pola pikir usaha yang kokoh pada mahasiswa (Rahmawati & Kurniawan, 2024). Melalui mata kuliah Studi Sosial Ekonomi dan Kewirausahaan, mahasiswa dilatih untuk peka terhadap masalah sosial sekaligus jeli melihat peluang pasar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi atas proses belajar tersebut, portofolio ini disusun. Di dalamnya merangkum seluruh analisis, gagasan, dan rancangan bisnis yang mengintegrasikan teori sosial ekonomi dengan praktik kewirausahaan nyata yang telah dipelajari sepanjang perkuliahan.

Portofolio 1

Menanamkan Skala Prioritas dan Pengambilan Keputusan Bijak pada Generasi Muda

Di era disrupsi digital, generasi muda dihadapkan pada paparan arus informasi dan kemudahan transaksi keuangan yang masif. Kemudahan ini memicu pergeseran pola konsumsi yang cenderung mengedepankan gaya hidup konsumerisme dan individualisme. Portofolio ini mengonstruksi pemahaman konsep dasar ekonomi khususnya pemosisian skala prioritas dan kalkulasi biaya peluang bukan sekadar sebagai materi hafalan teoretis, melainkan sebagai instrumen kognitif dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, portofolio ini menawarkan peta jalan aplikatif untuk mentransformasi cara berpikir acak menjadi keputusan ekonomi yang rasional, bijak, dan berkelanjutan.

Perkembangan abad ke-21 mengubah cara individu merespons pasar. Ekonomi digital melonggarkan batasan ruang, membuat pemenuhan keinginan sering kali mengaburkan kebutuhan. Oleh karena itu, *re-centering* atau penataan ulang konsep kebutuhan primer, sekunder, dan tersier harus diadaptasi ke dalam kurikulum modern Ilmu ekonomi mikro menekankan bahwa setiap individu bertindak sebagai agen rasional yang berusaha memaksimalkan kepuasan di bawah batasan kelangkaan. Generasi muda perlu dilatih untuk memahami mekanisme pasar ini agar tidak terjebak dalam keputusan impulsif (Kusumah dkk., 2025). Keputusan ekonomi yang bijak pada masa kini tidak boleh mengorbankan hak ekologis masa depan. Menanamkan skala prioritas juga berarti melatih generasi muda untuk memilih konsumsi yang mendukung *circular economy* meminimalkan sisa buangan dan mengoptimalkan utilitas barang.

Portofolio 2

Analisis Perilaku Konseumen Remaja di Era E-Commerce dalam Pembelajaran IPS

Di era digital abad ke-21, lanskap ekonomi telah bertransformasi secara radikal. Kehadiran *e-commerce*, fitur belanja sekali klik, algoritma rekomendasi personal, hingga sistem pembayaran berbasis *paylater* telah mengubah cara individu berinteraksi dengan pasar. Fenomena ini paling berdampak pada kelompok remaja pribumi digital yang secara psikologis berada dalam fase pencarian identitas dan rentan terhadap konformitas sosial. Bagi mereka, aktivitas belanja *online* bukan lagi sekadar pemenuhan kebutuhan fungsional, melainkan sarana validasi sosial dan gaya hidup.

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), khususnya pada dimensi ekonomi, memegang tanggung jawab besar untuk merespons pergeseran perilaku ini. IPS tidak boleh lagi diajarkan sebagai hafalan teks mati mengenai definisi pasar tradisional atau hukum permintaan-penawaran yang abstrak. Pembelajaran IPS harus mampu mendikonstruksi realitas digital ini, mentransformasi ruang kelas menjadi laboratorium kritis di mana remaja belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gempuran stimulasi visual *e-commerce*.

Teori perilaku konsumen pada hakikatnya merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka (Kotler & Keller, 2016). Pada kelompok usia remaja, perilaku konsumsi memiliki karakteristik psikologis yang unik. Remaja berada pada fase transisi pencarian identitas diri yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sebaya (*peer group*). Dalam konteks digital, hal ini memicu fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO), yaitu kecemasan sosial ketika merasa tertinggal dari tren yang sedang berkembang di media sosial (Pratama & Nurhayati, 2023). Akibatnya, rasionalitas ekonomi sering kali dikesampingkan. Remaja cenderung melakukan *impulse buying*, yaitu tindakan membeli barang secara spontan tanpa perencanaan matang, yang dipicu oleh stimulasi visual algoritma *e-commerce* dan kemudahan transaksi digital. Di era *e-commerce* yang menyediakan fitur kemudahan adaptif seperti dompet digital dan *paylater*, literasi finansial menjadi tameng kognitif utama bagi remaja agar terhindar dari perilaku konsumtif yang eksemif dan kecemasan finansial di usia muda.

Literasi finansial modern harus diintegrasikan dengan nilai-kesadaran lingkungan melalui paradigma Ekonomi Berkelanjutan. Pilihan konsumsi yang dilakukan oleh generasi muda hari ini memiliki konsekuensi logis terhadap ekosistem global, mulai dari penumpukan limbah kemasan plastik hingga jejak karbon dari rantai distribusi logistik *e-commerce* (World Economic Forum, 2023). Oleh karena itu, menanamkan skala prioritas dalam pembelajaran IPS juga berarti melatih generasi muda untuk menerapkan prinsip *green consumerism* yaitu perilaku konsumsi yang bertanggung jawab, kritis, dan berorientasi pada kelestarian masa depan bumi.

Ketika membawa fenomena *e-commerce* ke dalam pembelajaran IPS, kita sedang menguji bagaimana teori-teori kelangkaan dan skala prioritas bekerja secara riil di dalam dompet digital remaja. Melalui metode berbasis kasus, peserta didik diajak untuk menguliti kebiasaan konsumsi mereka sendiri. Sebagai contoh, remaja sering kali terjebak dalam bias kognitif yang diciptakan oleh algoritma media sosial. Fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) membuat mereka merasa harus memiliki barang yang sedang tren, meskipun barang tersebut tidak memiliki nilai guna yang mendesak bagi kehidupan akademis maupun personal mereka.

Portofolio 3

Menakar Efek Inflasi dan Pengangguran terhadap Kesejahteraan Sosial Melalui Perspektif IPS

Inflasi dan pengangguran merupakan dua indikator ekonomi yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa sehingga daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Sementara itu, pengangguran mengakibatkan berkurangnya pendapatan rumah tangga, meningkatnya risiko kemiskinan, serta munculnya berbagai permasalahan sosial seperti kesenjangan sosial, kriminalitas, dan menurunnya akses terhadap pendidikan maupun kesehatan. Oleh karena itu, kedua fenomena ini dapat menghambat upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa inflasi dan pengangguran memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karena memengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mempertahankan kualitas hidup yang layak (Prasetyo & Kurniawan, 2024).

Dalam perspektif Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), inflasi dan pengangguran tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Kesejahteraan sosial akan lebih mudah tercapai apabila terdapat stabilitas ekonomi, kesempatan kerja yang memadai, serta kebijakan pemerintah yang mampu melindungi kelompok masyarakat yang rentan. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan ekonomi dan pembangunan sosial dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Prasetyo & Kurniawan, 2024).

Protfolio 4

Strategi Bertahan dan Akselerasi Usaha Lokal di Tengah Arus Pasar Digital global

Di tengah arus pasar digital global yang semakin kompetitif, usaha lokal tidak lagi cukup hanya mengandalkan keunggulan produk atau kedekatan geografis dengan konsumen. Kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, memanfaatkan platform digital, serta memahami perubahan perilaku pasar menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Berbagai kajian menunjukkan bahwa digitalisasi, diversifikasi pasar, inovasi produk, dan kolaborasi antarpelaku usaha merupakan strategi utama yang mampu meningkatkan ketahanan dan daya saing usaha lokal di era ekonomi digital. Pelaku usaha yang mengintegrasikan strategi tersebut cenderung memiliki kemampuan bertahan dan berkembang yang lebih baik dibandingkan usaha yang masih mengandalkan pola bisnis konvensional (Humaira, 2025).

Selain bertahan, usaha lokal juga perlu melakukan akselerasi melalui transformasi digital yang berkelanjutan, seperti optimalisasi media sosial, pemanfaatan e-commerce, penggunaan data pelanggan, serta penguatan identitas dan keunikan produk lokal. Dalam perspektif IPS, proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi global. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas digital sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan usaha lokal agar mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar digital global.

Portofoliol 5

Membangun Kembali Semangat Gotong Royong Ekonomi di Kalangan Gen Z

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi ekonomi masyarakat, termasuk di kalangan Generasi Z yang cenderung lebih akrab dengan platform digital dibandingkan model organisasi ekonomi konvensional. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong ekonomi melalui transformasi koperasi tradisional menjadi koperasi berbasis aplikasi atau

platform digital. Dengan memanfaatkan teknologi, koperasi dapat menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses, transparan, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan generasi muda tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar seperti kebersamaan, partisipasi, dan keadilan ekonomi. Koperasi platform tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekonomi, tetapi juga sebagai media pembelajaran sosial yang mendorong kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran koperasi digital dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemandirian ekonomi generasi muda sekaligus membangun kembali budaya gotong royong yang mulai tergerus oleh individualisme di era digital. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun komunitas pemuda, untuk mengembangkan ekosistem koperasi digital yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu menjadi alternatif ekonomi yang relevan bagi Generasi Z (Setiawan, 2026).

Portofolio 6

Menggali Potensi Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal sebagai Penggerak Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi berkelanjutan karena mampu mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial, dan pelestarian budaya dalam satu ekosistem pembangunan. Berbagai sektor seperti kerajinan tradisional, kuliner khas daerah, seni pertunjukan, hingga jasa berbasis kearifan lokal dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus sarana menjaga identitas budaya daerah. Pengembangan ekonomi kreatif yang berlandaskan budaya lokal tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Mayasari & Suhendro, 2024).

Selain memberikan manfaat ekonomi, pendekatan ekonomi kreatif yang mengedepankan kearifan lokal juga berkontribusi terhadap pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Pemanfaatan bahan baku lokal, pengelolaan sumber daya secara bijaksana, serta penerapan prinsip produksi berkelanjutan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat. Studi mengenai ekonomi kreatif berbasis budaya maritim menunjukkan

bahwa integrasi antara kreativitas, budaya lokal, dan pelestarian lingkungan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan konsumsi yang bertanggung jawab (Wardana, Nurhikmah, & Angella, 2025).

Ekonomi kreatif berbasis budaya lokal mencerminkan hubungan yang erat antara aktivitas ekonomi, kehidupan sosial, dan identitas budaya masyarakat. Keberhasilan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga oleh kemampuannya dalam memperkuat kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan budaya di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif perlu didukung melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, inovasi produk, serta penguatan pemasaran digital agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas tanpa kehilangan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya (Putri et al., 2024).

Dengan demikian, ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dapat menjadi strategi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas budaya, dan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan yang tepat, kekayaan budaya lokal dapat diubah menjadi sumber daya ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global (Wardana et al., 2025; Mayasari & Suhendro, 2024).

Portofolio 7

Menakar Posisi dan Strategi Ekonomi Internasional Melalui Perjanjian Dagang Bebas

Perjanjian dagang bebas telah menjadi salah satu instrumen penting dalam dinamika ekonomi internasional yang memungkinkan negara-negara memperluas akses pasar, meningkatkan volume perdagangan, serta memperkuat kerja sama ekonomi antarnegara. Bagi Indonesia, keterlibatan dalam berbagai perjanjian dagang bebas membuka peluang untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global melalui pengurangan hambatan tarif maupun non-tarif. Namun, di sisi lain, liberalisasi

perdagangan juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya persaingan dengan produk impor yang dapat memengaruhi daya saing industri dalam negeri apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan produktivitas nasional (Hidayat, 2025).

Dalam konteks persaingan ekspor-impor global, Indonesia perlu memanfaatkan keunggulan komparatif yang dimiliki, seperti sumber daya alam yang melimpah, potensi ekonomi kreatif, serta bonus demografi yang dapat mendukung produktivitas nasional. Strategi penguatan ekspor tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah produk yang dipasarkan ke luar negeri, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif. Dengan demikian, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan memperkuat posisinya dalam rantai nilai global (Hidayat, 2025).

Perjanjian dagang bebas tidak hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari interaksi sosial, politik, dan hubungan antarnegara dalam era globalisasi. Kebijakan perdagangan internasional yang diambil pemerintah akan berdampak pada kehidupan masyarakat, mulai dari kesempatan kerja, kesejahteraan pelaku usaha, hingga stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika perdagangan global menjadi penting agar masyarakat dapat melihat keterkaitan antara kebijakan ekonomi internasional dan kondisi sosial-ekonomi di dalam negeri. Dengan demikian, posisi Indonesia dalam kontestasi ekonomi dunia harus dibangun melalui strategi yang seimbang antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional. Pemerintah perlu terus memperkuat daya saing industri domestik, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk asing, tetapi juga mampu menjadi pemain utama dalam perdagangan internasional. Melalui strategi tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh perjanjian dagang bebas sekaligus menghadapi berbagai tantangan ekonomi global secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Portofolio 8

Peran Ekonomi Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan semata sering kali menimbulkan berbagai eksternalitas negatif, seperti pencemaran udara, kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta meningkatnya emisi gas rumah kaca. Dampak-dampak tersebut tidak hanya mengancam keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup masyarakat dan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, konsep *green economy* hadir sebagai pendekatan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Rachmawati, Mulyono, & Riorini, 2025).

Transisi menuju ekonomi hijau menuntut perubahan paradigma dalam dunia usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha tidak lagi hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap aktivitas produksi dan konsumsi. Penerapan teknologi ramah lingkungan, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penggunaan bahan baku berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mengurangi eksternalitas negatif dan menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran dan kesiapan generasi muda terhadap kewirausahaan hijau memiliki peran strategis dalam mempercepat transformasi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan (Rachmawati et al., 2025).

Selain aspek ekonomi, pembangunan *green economy* juga memerlukan dukungan dari sektor pendidikan dan kebijakan publik. Pendidikan kewirausahaan yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dapat membentuk pola pikir generasi muda agar lebih peduli terhadap isu lingkungan dan mampu menciptakan inovasi bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan regulasi, insentif, dan program pendampingan yang mendorong praktik usaha hijau serta investasi pada sektor-sektor yang mendukung pelestarian lingkungan (Rachmawati et al., 2025).

Ekonomi lingkungan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan lingkungan tempat manusia hidup. Kerusakan lingkungan

akibat aktivitas ekonomi akan berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti menurunnya kesehatan, berkurangnya sumber mata pencaharian, hingga meningkatnya risiko bencana ekologis. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan (Yulianti & Prasetyo, 2024).

Membangun kesadaran *green economy* merupakan langkah penting dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Melalui pengurangan eksternalitas negatif, penguatan pendidikan lingkungan, serta pengembangan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga menjaga kelestarian bumi bagi generasi mendatang. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya ekonomi hijau menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan (Rachmawati et al., 2025; Yulianti & Prasetyo, 2024).

Potofolio 9

Menghitung Nilai Nyata Ekosistem dalam Upaya Menjaga Keseimbangan Global

Valuasi ekonomi sumber daya alam merupakan pendekatan yang penting dalam pembangunan berkelanjutan karena membantu mengukur nilai nyata yang diberikan oleh ekosistem kepada kehidupan manusia. Selama ini, berbagai manfaat lingkungan seperti penyediaan air bersih, pengendalian banjir, penyerapan karbon, serta pelestarian keanekaragaman hayati sering kali tidak diperhitungkan dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam cenderung dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, valuasi ekonomi diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai manfaat dan biaya yang muncul dari pemanfaatan sumber daya alam (Fitriani, 2024). Dalam perspektif ekonomi lingkungan, alam tidak hanya dipandang sebagai sumber keuntungan yang dapat dieksploitasi, tetapi juga sebagai aset yang perlu dijaga dan dipulihkan keberlanjutannya. Pendekatan ini mendorong pelaku usaha dan pemerintah untuk

tidak sekadar mengambil manfaat ekonomi dari lingkungan, melainkan juga berinvestasi dalam kegiatan restorasi ekosistem, konservasi sumber daya alam, serta penerapan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Investasi pada pelestarian lingkungan terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui peningkatan kualitas ekosistem, pengurangan risiko bencana, dan terjaganya sumber daya bagi generasi mendatang (Fitriani, 2024; Wibowo & Rahman, 2023).

Valuasi ekonomi sumber daya alam menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas ekonomi yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya kerentanan ekonomi, serta berkurangnya akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menerapkan prinsip pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, valuasi ekonomi sumber daya alam dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan secara global (Wibowo & Rahman, 2023).

Potofolio 10

Mengintegrasikan Tradisi Pembelajaran IPS dengan Isu Ekonomi Kontemporer: Studi Kasus *Civic Competence*

Integrasi isu ekonomi kontemporer ke dalam pembelajaran IPS merupakan langkah penting dalam membentuk *civic competence* atau kompetensi kewarganegaraan yang relevan dengan tantangan abad ke-21. Dalam tradisi *social studies*, isu ekonomi tidak hanya dipahami sebagai kumpulan konsep dan teori, tetapi juga sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis masalah sosial, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan yang menekankan isu, refleksi, dan aksi, peserta didik didorong untuk memahami berbagai persoalan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, kemiskinan, konsumsi berkelanjutan, dan ekonomi digital sebagai bagian dari realitas kehidupan yang memerlukan respons kritis dan solutif (Saputra, 2025).

Literasi ekonomi dalam pembelajaran IPS memiliki peran strategis dalam membentuk *critical economic citizenship*, yaitu warga negara yang mampu memahami konsekuensi ekonomi dari setiap keputusan yang diambil, baik sebagai konsumen, produsen, maupun anggota masyarakat. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban ekonomi, keadilan sosial, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap kehidupan masyarakat dapat membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan etis dalam menghadapi berbagai fenomena ekonomi kontemporer. Integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran ekonomi juga terbukti mampu memperkuat karakter tanggung jawab, kejujuran, kerja sama, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang berintegritas (Hafizah et al., 2025).

Pembelajaran ekonomi yang kontekstual perlu menghubungkan materi dengan berbagai isu global yang sedang berkembang, seperti transformasi digital, globalisasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik memahami keterkaitan antara keputusan ekonomi individu dengan dampaknya terhadap masyarakat luas. Pembelajaran yang mengaitkan isu ekonomi global dengan pengalaman nyata peserta didik juga dapat meningkatkan kesadaran sosial serta kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan sosial-ekonomi yang semakin kompleks (Fithriyani, Nurfalalah, & Dewi, 2025).

Pengintegrasian tradisi pembelajaran IPS dengan isu ekonomi kontemporer menjadi fondasi penting dalam membangun kompetensi kewarganegaraan yang kritis, reflektif, dan partisipatif. Melalui penguatan literasi ekonomi dan nilai-nilai kewarganegaraan, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan ekonomi, tetapi juga kemampuan untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembelajaran IPS perlu terus dikembangkan sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang mampu memahami, mengevaluasi, dan merespons berbagai persoalan ekonomi secara bijaksana demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, adil, dan berkelanjutan (Saputra, 2025; Hafizah et al., 2025).

Portofolio 11

Menghubungkan Isu Produksi Global dengan Konsep Ruang dan Waktu di Sekolah Menengah

Pembelajaran IPS di sekolah menengah memiliki peran penting dalam membantu peserta didik memahami keterkaitan antara fenomena ekonomi global dengan konsep ruang dan waktu yang menjadi dasar kajian IPS. Dalam konteks ekonomi modern, proses produksi tidak lagi berlangsung dalam satu wilayah tertentu, melainkan melibatkan jaringan rantai pasok global yang menghubungkan berbagai negara dan kawasan. Oleh karena itu, pendekatan tematik terintegrasi memungkinkan peserta didik melihat bagaimana aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi dipengaruhi oleh faktor geografis serta perkembangan historis yang terjadi dari waktu ke waktu (Utami, 2024). Konsep ruang dalam IPS membantu peserta didik memahami bahwa lokasi geografis, ketersediaan sumber daya alam, akses transportasi, serta kondisi lingkungan menjadi faktor penting dalam menentukan pusat-pusat produksi dunia. Sebagai contoh, bahan baku dapat berasal dari satu negara, diproses di negara lain, dan dipasarkan ke berbagai belahan dunia melalui jaringan perdagangan internasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi modern sangat dipengaruhi oleh interaksi antarruang yang semakin intensif akibat perkembangan teknologi dan globalisasi (Utami, 2024).

Sementara itu, konsep waktu memberikan pemahaman bahwa sistem produksi global yang ada saat ini merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang. Revolusi Industri, perkembangan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan, hingga transformasi digital telah mengubah pola produksi dan distribusi barang secara signifikan. Dengan memahami dimensi historis tersebut, peserta didik dapat melihat bahwa perubahan ekonomi global tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai peristiwa dan kebijakan yang berlangsung secara berkelanjutan dari masa ke masa (Rahman & Wibowo, 2023). Pendekatan tematik yang menghubungkan ruang, waktu, dan isu ekonomi kontemporer juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Mereka tidak hanya mempelajari konsep-konsep IPS secara terpisah, tetapi juga memahami hubungan antara kondisi geografis, perkembangan sejarah, dan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang kontekstual semacam ini membantu peserta didik menganalisis

berbagai persoalan global, seperti ketergantungan ekonomi antarnegara, gangguan rantai pasok, serta dampak globalisasi terhadap kehidupan masyarakat lokal (Utami, 2024). Analisis terhadap rantai pasok global menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi selalu berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai dimensi utama kehidupan manusia. Pemahaman ini penting untuk membentuk kesadaran peserta didik bahwa setiap produk yang mereka gunakan merupakan bagian dari jaringan ekonomi global yang melibatkan banyak wilayah dan proses sejarah yang kompleks. Dengan demikian, pembelajaran IPS tidak hanya memberikan pengetahuan faktual, tetapi juga membangun kemampuan analitis dalam memahami dinamika dunia yang terus berubah (Rahman & Wibowo, 2023).

Oleh karena itu, pengintegrasian isu produksi global ke dalam pembelajaran IPS berbasis tema menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan relevansi pembelajaran di sekolah menengah. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara aspek geografis, historis, dan ekonomi dalam kehidupan global. Selain memperkuat literasi sosial dan ekonomi, pendekatan ini juga mendukung terbentuknya warga negara yang kritis, adaptif, dan mampu memahami tantangan dunia modern secara komprehensif (Utami, 2024; Rahman & Wibowo, 2023).

Portofolio 12

Rekonstruksi Makna Pendidikan Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan selama ini sering dipahami secara sempit sebagai pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berjualan atau memperoleh keuntungan melalui kegiatan usaha. Padahal, esensi kewirausahaan jauh lebih luas daripada sekadar aktivitas ekonomi. Pendidikan kewirausahaan merupakan proses pembentukan pola pikir, karakter, dan sikap yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan kreativitas, kemandirian, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, rekonstruksi makna pendidikan kewirausahaan perlu dilakukan agar fokus pembelajaran tidak hanya pada aspek teknis bisnis, tetapi juga pada pengembangan kualitas diri peserta didik (Rahmawati & Kurniawan, 2024).

Salah satu tujuan utama pendidikan kewirausahaan adalah membentuk *entrepreneurial mindset*, yaitu pola pikir yang mendorong individu untuk melihat peluang, berpikir inovatif, dan berani mengambil keputusan dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Melalui pendidikan ekonomi dan kewirausahaan, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, serta menciptakan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut menjadi bekal penting bagi generasi muda dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang semakin kompleks di era globalisasi dan digitalisasi (Rahmawati & Kurniawan, 2024).

Selain membangun kreativitas, pendidikan kewirausahaan juga berperan dalam menumbuhkan karakter tangguh atau *resilience*. Dalam proses berwirausaha, kegagalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan menuju keberhasilan. Oleh karena itu, peserta didik perlu dibekali dengan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, mengelola risiko, serta tetap optimis dalam menghadapi berbagai tantangan. Karakter tangguh ini tidak hanya bermanfaat dalam dunia usaha, tetapi juga dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan dunia kerja secara umum (Sari & Nugraha, 2023).

Pendidikan kewirausahaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembentukan warga negara yang produktif dan bertanggung jawab. Individu yang memiliki jiwa kewirausahaan cenderung lebih mandiri, mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Dengan demikian, kewirausahaan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi individu, tetapi juga mampu menciptakan dampak sosial yang positif melalui penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat (Pratama & Lestari, 2025).

Perkembangan teknologi dan ekonomi digital menuntut adanya perubahan dalam pendekatan pendidikan kewirausahaan. Generasi muda perlu dibekali dengan keterampilan adaptif yang memungkinkan mereka merespons perubahan pasar, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kemampuan berinovasi, berkolaborasi, memanfaatkan teknologi digital, serta membaca peluang baru menjadi kompetensi penting yang harus dikembangkan melalui pendidikan kewirausahaan modern (Pratama & Lestari, 2025). Dengan

demikian, pendidikan kewirausahaan perlu dipahami sebagai sarana pembentukan karakter dan mentalitas yang mendukung keberhasilan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Fokus utamanya bukan hanya menciptakan pelaku usaha, tetapi juga membentuk pribadi yang kreatif, adaptif, berani mengambil risiko, serta mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang positif dan produktif. Melalui pendekatan tersebut, pendidikan kewirausahaan dapat menjadi instrumen penting dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh, inovatif, dan siap menghadapi perubahan di masa depan (Rahmawati & Kurniawan, 2024; Sari & Nugraha, 2023; Pratama & Lestari, 2025).

Portofolio 13

Implementasi Pendidikan Kewirausahaan di Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal

Pendidikan kewirausahaan memiliki peran penting dalam membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang. Implementasinya tidak hanya dilakukan melalui lembaga pendidikan formal, tetapi juga melalui berbagai program pendidikan non-formal seperti pelatihan komunitas, inkubator bisnis, dan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kedua jalur tersebut memiliki karakteristik, pendekatan, dan metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dalam lembaga pendidikan formal, khususnya melalui Kurikulum Merdeka, pendidikan kewirausahaan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran yang menekankan pengembangan kompetensi, kreativitas, pemecahan masalah, serta pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengenali potensi diri, mengembangkan ide usaha, dan memahami konsep kewirausahaan sejak dini. Pendekatan ini bertujuan membangun pola pikir kewirausahaan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesiapan menghadapi dunia kerja maupun kehidupan sosial di masa depan (Amin et al., 2025). Sementara itu, pendidikan kewirausahaan pada jalur non-formal, seperti pelatihan komunitas bisnis dan inkubator usaha, lebih menekankan pada pengalaman praktis dan kebutuhan nyata dunia usaha. Peserta tidak hanya mempelajari konsep, tetapi juga terlibat langsung dalam pengembangan produk, pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga strategi menghadapi persaingan pasar.

Lingkungan pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis praktik memungkinkan peserta memperoleh pengalaman yang lebih dekat dengan kondisi bisnis sebenarnya (Putri & Hidayat, 2024).

Kedua jalur pendidikan tersebut memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam membangun sumber daya manusia yang produktif dan inovatif. Pendidikan formal berperan dalam membentuk fondasi pengetahuan, karakter, dan pola pikir kewirausahaan, sedangkan pendidikan non-formal memperkuat keterampilan teknis serta pengalaman praktis yang dibutuhkan dalam dunia usaha. Sinergi antara keduanya dapat menghasilkan individu yang tidak hanya memahami konsep kewirausahaan, tetapi juga mampu menerapkannya secara efektif dalam kehidupan nyata. Implementasi pendidikan kewirausahaan di lembaga formal dan non-formal menunjukkan bahwa pengembangan jiwa kewirausahaan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, komunitas bisnis, dan lembaga pelatihan menjadi penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan kewirausahaan yang lebih kuat. Melalui integrasi antara pembelajaran teoritis dan pengalaman praktis, pendidikan kewirausahaan dapat berkontribusi dalam mencetak generasi yang kreatif, mandiri, adaptif, dan mampu menciptakan peluang ekonomi bagi dirinya maupun masyarakat (Amin et al., 2025; Putri & Hidayat, 2024).

Portofolio 14

Menyesuaikan Karakteristik Peserta Didik dengan Desain Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Tahap Perkembangan

Desain pembelajaran kewirausahaan yang efektif perlu mempertimbangkan karakteristik peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan psikologis, kognitif, sosial, dan motoriknya. Setiap kelompok usia memiliki kebutuhan, minat, serta kemampuan yang berbeda dalam memahami konsep kewirausahaan. Oleh karena itu, materi prakarya dan kewirausahaan tidak dapat disajikan secara seragam, melainkan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mampu mengembangkan potensi mereka secara optimal. Pada generasi Z dan Alpha yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital,

pendekatan pembelajaran juga perlu mengakomodasi karakteristik mereka yang cenderung visual, interaktif, kreatif, dan dekat dengan teknologi (Pratama, 2026).

Dalam konteks perkembangan remaja, pendidikan kewirausahaan tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang bisnis, tetapi juga membantu peserta didik membangun kepercayaan diri, kreativitas, kemampuan mengambil keputusan, serta keberanian menghadapi risiko. Materi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan akan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada tingkat sekolah menengah, pembelajaran dapat diarahkan pada proyek sederhana yang memungkinkan siswa mengembangkan ide produk, melakukan promosi digital, dan memahami dasar-dasar pengelolaan usaha secara praktis (Pratama, 2026). Penyesuaian pembelajaran dengan karakteristik peserta didik merupakan bagian penting dari upaya membentuk individu yang produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial-ekonomi. Pembelajaran kewirausahaan yang memperhatikan aspek perkembangan peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar, partisipasi aktif, serta kemampuan memecahkan masalah yang relevan dengan lingkungan mereka. Selain itu, pendekatan yang kontekstual juga membantu peserta didik memahami hubungan antara aktivitas ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan peluang usaha yang berkembang di era digital (Wulandari & Hidayat, 2025).

Keberhasilan pendidikan kewirausahaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pendidik dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Integrasi antara pemahaman psikologi perkembangan, kebutuhan generasi digital, dan tujuan pembelajaran kewirausahaan akan menghasilkan proses pendidikan yang lebih efektif dalam membangun karakter mandiri, kreatif, dan berjiwa wirausaha. Melalui pendekatan tersebut, peserta didik tidak hanya memperoleh keterampilan ekonomi, tetapi juga kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja di masa depan (Pratama, 2026; Wulandari & Hidayat, 2025).

Portofolio 15

Internalisasi Nilai dan Kompetensi Kewirausahaan Melalui Pembelajaran IPS SMP/SMA

Pembelajaran IPS di tingkat SMP dan SMA memiliki peran strategis dalam menginternalisasikan nilai dan kompetensi kewirausahaan sebagai bagian dari pengembangan karakter peserta didik. Kewirausahaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menjalankan usaha, tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang mencakup disiplin, tanggung jawab, kreativitas, inovasi, kemandirian, serta kemampuan mengambil keputusan secara bijaksana. Oleh karena itu, nilai-nilai kewirausahaan perlu diintegrasikan ke dalam indikator ketercapaian pembelajaran IPS agar peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan sosial, tetapi juga memiliki karakter yang mendukung keberhasilan mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja. Internalisasi nilai kewirausahaan dapat dilakukan melalui berbagai strategi pembelajaran yang kontekstual, seperti studi kasus ekonomi, proyek kewirausahaan sederhana, pembelajaran berbasis masalah, maupun analisis fenomena sosial-ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik dapat belajar untuk berpikir kritis, mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengembangkan sikap inovatif dan mandiri. Pembelajaran IPS yang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata juga memungkinkan peserta didik memahami pentingnya nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari (Sachrir, 2025).

Penguatan kompetensi kewirausahaan merupakan bagian dari upaya membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial maupun ekonomi. Kompetensi seperti kemampuan berkolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, dan pengelolaan sumber daya menjadi bekal penting bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan perlu diposisikan sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial (Nugroho & Wulandari, 2024). Integrasi nilai dan kompetensi kewirausahaan dalam pembelajaran IPS dapat mendukung terciptanya peserta didik yang disiplin, kreatif, inovatif, dan mandiri. Melalui proses pembelajaran yang terencana dan berorientasi pada pengembangan karakter, peserta didik akan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi

berbagai tantangan kehidupan serta berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan merupakan bagian penting dari upaya membangun generasi yang produktif, berdaya saing, dan bertanggung jawab sebagai warga negara (Sachrir, 2025; Nugroho & Wulandari, 2024).

Portofolio 16

Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan yang Fleksibel dan Kontekstual

Pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan pada era yang penuh perubahan menuntut adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Perubahan teknologi, perkembangan ekonomi digital, serta dinamika kebutuhan pasar kerja menyebabkan kurikulum yang bersifat kaku dan berorientasi pada teori semata menjadi kurang relevan. Oleh karena itu, pendidikan kewirausahaan perlu dirancang sebagai proses pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan lingkungan ekonomi sehingga peserta didik mampu mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan (Kusuma, 2024).

Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum kewirausahaan memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan materi, metode, dan pengalaman belajar dengan kondisi peserta didik serta perkembangan dunia usaha yang terus berubah. Dalam paradigma Kurikulum Merdeka, peserta didik diberikan ruang yang lebih luas untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan potensi kewirausahaan melalui pembelajaran berbasis proyek, pemecahan masalah, dan pengalaman nyata. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami bahwa kewirausahaan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan kemampuan belajar sepanjang hayat (Kusuma, 2024).

Selain fleksibel, kurikulum kewirausahaan juga harus bersifat kontekstual agar pembelajaran memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Materi yang dikembangkan perlu mengangkat isu-isu aktual, peluang usaha lokal, perkembangan ekonomi digital, serta tantangan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami relevansi pembelajaran kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada di lingkungan mereka.

Kurikulum kewirausahaan yang responsif juga perlu mengintegrasikan berbagai keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi digital. Keterampilan tersebut menjadi sangat penting karena keberhasilan seorang wirausaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar, memanfaatkan teknologi, serta membangun jejaring yang luas. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang untuk memberikan pengalaman yang mendorong pengembangan kompetensi-kompetensi tersebut secara berkelanjutan (Kusuma, 2024).

Pengembangan kurikulum kewirausahaan yang fleksibel dan kontekstual memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang produktif, kreatif, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Pembelajaran kewirausahaan yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi setempat dapat membantu peserta didik memahami berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus mendorong mereka untuk mencari solusi melalui inovasi dan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah (Nugraha & Wulandari, 2023).

Kurikulum kewirausahaan yang adaptif perlu didukung oleh kolaborasi antara sekolah, dunia usaha, komunitas, dan pemerintah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih autentik melalui magang, kunjungan industri, mentoring, maupun proyek kewirausahaan berbasis masyarakat. Dengan adanya keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, peserta didik dapat memahami kebutuhan pasar secara lebih nyata dan mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini (Rahman & Putri, 2025). Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan kewirausahaan yang fleksibel dan kontekstual menjadi landasan penting dalam menciptakan pembelajaran yang relevan, adaptif, dan berorientasi pada masa depan. Kurikulum yang mampu merespons perubahan tren pasar, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewirausahaan, tetapi juga karakter inovatif, mandiri, dan siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi di era global. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum kewirausahaan harus terus dilakukan secara dinamis agar tetap selaras dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Kusuma, 2024; Rahman & Putri, 2025; Nugraha & Wulandari, 2023).

Portofolio 17

Membentuk Mentalitas *Intrepreneur* dan *Entrepreneur* demi Mewujudkan SDM Unggul Indonesia Emas 2045

Terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perubahan ekonomi global, serta dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif. Dalam konteks tersebut, pembentukan mentalitas *entrepreneur* dan *intrapreneur* menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Seorang *entrepreneur* dituntut mampu menciptakan peluang usaha dan inovasi baru, sedangkan *intrapreneur* memiliki kemampuan berpikir kreatif, inovatif, dan berorientasi pada solusi meskipun bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Kedua karakter tersebut menjadi kompetensi yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi ketidakpastian dunia kerja di era digital. Pendidikan ekonomi berbasis kewirausahaan memiliki peran strategis dalam menumbuhkan pola pikir adaptif, kreatif, dan berani mengambil risiko pada generasi muda. Melalui pembelajaran yang mengintegrasikan pengalaman nyata, pemecahan masalah, serta pengembangan inovasi, peserta didik tidak hanya dibekali pengetahuan ekonomi, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi perubahan pasar kerja yang berlangsung sangat cepat. Kemampuan ini menjadi modal penting bagi generasi muda agar tidak hanya berorientasi sebagai pencari kerja (*job seeker*), tetapi juga mampu menjadi pencipta lapangan kerja (*job creator*) yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Ohara et al., 2025).

Pengembangan mentalitas *entrepreneur* dan *intrapreneur* tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial. Individu yang memiliki jiwa kewirausahaan cenderung lebih mandiri, inovatif, serta mampu melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Selain itu, kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan multikultural menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat internasional, terutama di tengah semakin terbukanya pasar tenaga kerja global (Pratama & Nugroho, 2024).

Peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 juga memerlukan dukungan ekosistem pendidikan yang mendorong lahirnya budaya inovasi dan kewirausahaan sejak dini. Sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah perlu bersinergi dalam menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, serta keterampilan abad ke-21 yang relevan dengan kebutuhan global. Dengan demikian, peserta didik dapat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi transformasi ekonomi dan teknologi yang terus berkembang (Sari & Wulandari, 2025). Oleh karena itu, pembentukan mentalitas *entrepreneur* dan *intrapreneur* harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Melalui penguatan pendidikan kewirausahaan, pengembangan karakter inovatif, serta peningkatan kompetensi global, Indonesia dapat menciptakan generasi yang unggul, produktif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Keberhasilan membangun SDM yang adaptif dan berdaya saing tinggi akan menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang maju, mandiri, dan berkelanjutan (Ohara et al., 2025; Pratama & Nugroho, 2024; Sari & Wulandari, 2025).

Portofolio 18

Peran Sentral Bank Sentral dan Bank Umum dalam Menjaga Stabilitas dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sistem perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam struktur perekonomian Indonesia, bank sentral dan bank umum menjalankan fungsi yang saling melengkapi untuk menciptakan kondisi ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Bank sentral berperan menjaga stabilitas moneter melalui pengendalian inflasi, pengaturan jumlah uang beredar, serta pemeliharaan stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, bank umum berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi produktif (Ramadhan, 2026).

Peran bank sentral dalam mengendalikan inflasi menjadi sangat penting karena stabilitas harga merupakan salah satu syarat utama terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan moneter, seperti pengaturan suku bunga dan

pengendalian likuiditas, bank sentral berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nilai mata uang. Inflasi yang terkendali akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha sehingga aktivitas investasi, produksi, dan konsumsi dapat berjalan dengan lebih optimal (Ramadhan, 2026).

Di sisi lain, bank umum memiliki kontribusi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit kepada sektor riil. Kredit usaha yang diberikan kepada pelaku UMKM, industri, pertanian, maupun sektor jasa dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat. Fungsi intermediasi perbankan ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian karena membantu menghubungkan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan untuk kegiatan produktif (Prasetyo & Hidayat, 2025). Keberadaan sistem perbankan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Akses terhadap layanan perbankan dan pembiayaan usaha dapat meningkatkan kesempatan ekonomi, mengurangi kesenjangan, serta mendukung pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif. Oleh karena itu, stabilitas sektor perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial suatu negara (Prasetyo & Hidayat, 2025).

Sinergi antara bank sentral dan bank umum menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan percepatan pertumbuhan nasional. Bank sentral berperan memastikan kondisi moneter tetap stabil, sementara bank umum mendorong aktivitas ekonomi melalui pembiayaan sektor riil. Apabila kedua lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara efektif, maka pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan merupakan instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ramadhan, 2026; Prasetyo & Hidayat, 2025).

Portofolio 19

Memperluas Inklusi Keuangan bagi Masyarakat Marginal

Perkembangan *financial technology* (fintech) dan lembaga keuangan non-bank telah membawa perubahan besar dalam upaya memperluas inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan perbankan formal. Kehadiran berbagai inovasi keuangan digital memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel tanpa harus menghadapi persyaratan yang rumit. Kondisi ini menjadi penting karena masih banyak pelaku usaha mikro, masyarakat berpenghasilan rendah, dan kelompok marginal yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan konvensional (Wijayanti, 2025).

Lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian memiliki peran strategis dalam menyediakan akses modal bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan jaminan aset tertentu. Selain itu, perusahaan modal ventura turut berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan usaha rintisan (*startup*) dan UMKM melalui penyediaan pembiayaan serta pendampingan bisnis. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut memberikan alternatif sumber pendanaan yang dapat membantu masyarakat mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kapasitas ekonominya (Wijayanti, 2025).

Di sisi lain, platform *peer-to-peer lending* (P2P lending) telah menjadi salah satu inovasi fintech yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan antara pemberi dana dan penerima dana secara langsung melalui sistem digital. Mekanisme ini membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh modal usaha, terutama bagi mereka yang belum memiliki akses kredit perbankan. Dengan proses yang relatif cepat dan berbasis teknologi, P2P lending dapat mempercepat inklusi keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital di berbagai daerah (Hidayat & Pratama, 2024).

Perluasan inklusi keuangan melalui fintech dan lembaga keuangan non-bank tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Akses terhadap pembiayaan dapat membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan

ekonomi, serta memperkuat kemandirian usaha. Namun demikian, peningkatan literasi keuangan tetap diperlukan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak dan terhindar dari berbagai risiko, seperti pinjaman ilegal atau praktik keuangan yang merugikan (Hidayat & Pratama, 2024). Fintech dan lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan merata. Melalui layanan pegadaian, modal ventura, dan platform P2P lending, masyarakat yang sebelumnya sulit memperoleh akses pembiayaan kini memiliki peluang yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan bahwa perkembangan teknologi keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Wijayanti, 2025; Hidayat & Pratama, 2024).

Portofolio 20

Membuka Sumbatan Akses Permodalan Bagi Wirausaha Pemula

Permodalan merupakan salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh wirausaha pemula dalam mengembangkan usaha. Keterbatasan aset, minimnya riwayat keuangan, serta rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal sering kali menjadi hambatan bagi pelaku usaha baru untuk memperoleh modal yang dibutuhkan. Dalam kondisi tersebut, sinergi antara lembaga keuangan dan sektor kewirausahaan menjadi faktor penting dalam membuka akses pembiayaan yang lebih luas sehingga wirausaha pemula dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan dan berdaya saing (Tanujaya, 2024).

Salah satu bentuk kebijakan yang berperan besar dalam mendukung perkembangan usaha baru adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan wirausaha yang memiliki usaha produktif tetapi mengalami keterbatasan modal. Dengan bunga yang relatif terjangkau serta persyaratan yang lebih mudah dibandingkan kredit komersial, KUR menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil sekaligus meningkatkan kesempatan kerja di masyarakat. Penelitian menunjukkan

bahwa penyaluran kredit mikro yang tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha wirausaha muda secara signifikan (Tanujaya, 2024).

Selain menyediakan modal usaha, lembaga keuangan juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi keuangan, pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas manajerial bagi para pelaku usaha. Dukungan tersebut penting karena keberhasilan wirausaha tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan, merencanakan bisnis, dan memanfaatkan peluang pasar secara efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan komunitas bisnis dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Akses permodalan yang inklusif memiliki dampak sosial dan ekonomi yang luas. Kemudahan memperoleh pembiayaan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, mengurangi pengangguran, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi kelompok yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan usaha tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan penguatan kesejahteraan sosial (Prasetyo & Hidayat, 2025).

Sinergi antara lembaga keuangan dan sektor kewirausahaan merupakan langkah strategis dalam mengatasi hambatan permodalan yang dihadapi wirausaha pemula. Melalui program seperti KUR dan berbagai skema pembiayaan produktif lainnya, pelaku usaha baru memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, penguatan akses pembiayaan yang disertai dengan pendampingan dan literasi keuangan perlu terus dilakukan agar mampu mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Tanujaya, 2024; Prasetyo & Hidayat, 2025).

Referensi

- Amin, M., dkk. (2025). *Ekosistem Pendidikan Kewirausahaan: Perbandingan Jalur Formal dan Inkubator Bisnis Komunitas*. *Jurnal Akuntabilitas Pendidikan*, 13(1), 45–58.
- Fitriani, L. (2024). *Ekonomi Lingkungan dan Akuntansi Hijau: Paradigma Baru Penyelamatan Ekosistem*. *Jurnal Ekologi dan Ekonomi Bisnis*, 11(4), 310–322.
- Hidayat, F. (2025). *Kontestasi Dagang Global: Peluang dan Tantangan Ekonomi Internasional Indonesia*. *Jurnal Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik*, 7(2), 142–155.
- Humaira, N. A. (2025). *Transformasi UMKM di Era Ekonomi Digital 2025: Strategi Inovatif Menuju Kemandirian dan Daya Saing Global*. *Jurnal Kajian Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Strategis*.
- Mayasari, R., & Suhendro. (2024). *Revitalisasi Ekonomi Lokal Melalui Pengembangan Produk UMKM: Studi Kasus di Desa Kreatif*. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(10), 281–286.
- Putri, R., & Hidayat, A. (2024). *Model Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Komunitas dalam Meningkatkan Kompetensi Wirausaha Muda*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 120–133.
- Putri, P. R. W., Tanjung, F., Wardana, I. M. W., & Sujana, I. M. (2024). *Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Desa Tanjung Benoa*. *Nusantara Hasana Journal*, 4(7).
- Pratama, A. (2026). *Psikologi Perkembangan Remaja dan Pengaruhnya terhadap Intensi Berwirausaha*. *Jurnal Implikasi Pendidikan dan Konseling*, 6(2), 112–126.
- Wulandari, S., & Hidayat, R. (2025). *Desain Pembelajaran Kewirausahaan Berbasis Karakteristik Generasi Digital dalam Pendidikan Menengah*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Inovasi Pembelajaran*, 10(1), 55–68.
- Rachmawati, S., Mulyono, & Riorini. (2025). *The Linkage Between Entrepreneurship Education and Green Entrepreneurship: Understanding Student Readiness for Green Enterprises*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 18(1), 61–75.
- Yulianti, D., & Prasetyo, H. (2024). *Green Economy dan Pembangunan Berkelanjutan: Strategi Mengurangi Dampak Lingkungan dalam Aktivitas Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 9(2), 88–101.
- Wardana, M., Nurhikmah, & Angella, N. N. (2025). *Peran Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendorong Ekonomi Biru yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara)*. *HIMIE Economics Research and Olympiad (HERO)*, 1(1).

- Mulawarman, L. (2026). *Critical Review pada Peran Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat*. *Journal of Applied Business and Economic Research (JAIM)*, 2(1), 9-20.
- Nugraha, D., & Wulandari, R. (2023). *Pembelajaran Kewirausahaan Kontekstual sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Abad 21*. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 8(3), 101–115.
- Ohara, M. R., Suarniki, N. N., & Setiawati, D. (2025). *Entrepreneurship-Based Economic Education: Enhancing the Young Generation's Ability to Deal with Job Market Uncertainty in the Digital Era*. *Journal of Management Economics and Accounting*, 2(4), 123–133.
- Rahmawati, Y. D., & Kurniawan, R. Y. (2024). *The Impact of Economic Education on the Entrepreneurial Mindset of Students*. *Journal of Business and Entrepreneurship (JOBES)*, 12(2).
- Sari, N., & Nugraha, A. (2023). *Penguatan Karakter Tangguh melalui Pendidikan Kewirausahaan pada Generasi Muda*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*, 11(1), 45–58.
- Pratama, D., & Lestari, S. (2025). *Entrepreneurial Mindset dan Adaptabilitas Generasi Digital dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan*. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Bisnis*, 9(1), 77–91.
- Kusuma, W. (2024). *Desain Kurikulum Kewirausahaan Responsif Pasar dalam Paradigma Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Kurikulum dan Pembelajaran*, 9(1), 60–74.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson Education.
- Prasetyo, A., & Kurniawan, D. (2024). *Pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(1), 45–58.
- Pratama, A. R., & Nurhayati, S. (2023). "Dampak Fenomena FOMO terhadap Perilaku Impulse Buying Remaja pada Platform E-Commerce". *Jurnal Psikologi Konsumen*, 8(2), 112-125.
- Saputra, R. (2025). *Mendudukan Isu Ekonomi dalam Tiga Tradisi Social Studies: Isu, Refleksi, dan Aksi*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 32(1), 75–88.
- Utami, S. B. (2024). *Pendekatan Tematik Terintegrasi dalam Pembelajaran IPS Berbasis Realitas Ekonomi*. *Jurnal Pedagogi IPS*, 8(2), 15–29.
- Rahman, A., & Wibowo, D. (2023). *Integrasi Konsep Ruang, Waktu, dan Aktivitas Ekonomi Global dalam Pembelajaran IPS Abad 21*. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 12(3), 201–214.

- Rahman, F., & Putri, A. N. (2025). *Pengembangan Kurikulum Kewirausahaan Berbasis Kebutuhan Industri dan Ekonomi Digital*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Inovasi, 12(1), 45–59.
- Hafizah, H., Imamuddin, M., Widianita, R., Ridhah, H., & Anisah, A. (2025). *Integrasi Nilai-nilai Kewarganegaraan dan Sosial dalam Pembelajaran Ekonomi untuk Membentuk Karakter Siswa yang Berintegritas*. Jurnal Educazione, 13(2), 125–134.
- Fithriyani, M., Nurfalah, S., & Dewi, R. S. (2025). *Analisis Tantangan Pembelajaran IPS dalam Konsep Kajian Sistem Ekonomi Global*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS), 5(2), 861–866.
- Tanujaya, H. (2024). *Analisis Efektivitas Penyaluran Kredit Mikro Terhadap Produktivitas Wirausaha Muda*. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, 17(3), 145–159.
- Wibowo, A., & Rahman, F. (2023). *Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Lingkungan*. Jurnal Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, 9(2), 85–99.
- World Economic Forum. (2023). *The Future of Consumption in a Digital-First World*. Geneva: WEF.